

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI PADA SITUASI
PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PADA KEGIATAN
KEAGAMAAN DI PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL
FITHRAH SURABAYA**

Aprilia Santini

UIN Sunan Ampel Surabaya

abdillahqzz@gmail.com

Abstract

The phenomenon that occurs Pandemic Covid-19 causes the disruption of some activities in Islamic boarding schools including in carrying out religious activities. The purpose of this study was (1) to explain the implementation of the normalization policy in the Covid-19 pandemic situation in religious activities at the Assalafi Al Fithrah Islamic Boarding School. (2) and know the factors that support and inhibit the implementation of new normal policies in the boarding school. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The theory used in this study is the theory of implementing the Donald Van Meter policy and Van Horn. The results of this study indicate that in the implementation of normalization policies in the Covid-19 pandemic situation (case study in religious activities at the Assalafi Al Fithrah Surabaya Islamic Boarding School). Influenced by six factors, among others, the standard / size of policy, communication, resources, dispositions, bureaucratic structures and conditions, social, economic and political. Supporting Factors Implementation of Normalization Policies Pandemic Covid-19 (Case Study of Religious Activities at the US Salafi Al Fithrah Surabaya Islamic Boarding School) is coordination and use of technology. While the inhibiting factor is the budget resource, the awareness of the surrounding community is low, and supervision is not optimal

Keywords: Implementation, Normalization, Covid-19 Pandemic, Religious Activities, Islamic Boarding School

Pendahuluan

Akhir tahun 2019 yakni pada bulan desember, dunia di hebohkan dengan adanya sebuah virus yang membuat masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Asal Mula virus corona (Covid-19) ditemukan di Tiongkok, Wuhan¹. Pada awalnya penyebab virus corona ini diduga akibat berasal dari paparan pasar grosir makanan laut

¹Yuliana. Corona Virus Disease Covid-19 ; *Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine*. Volume 2 Nomor 1 february 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ISSN 2655-9951. Hal 187-192.

yang menjual banyak spesies hewan hidup. Sampai saat ini Penyakit ini dengan cepat menyebar dan terdapat 220 Negara yang telah terjangkit virus ini (Data Worldometers, 23 Juni 2021)². Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang ditemukan dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia terutama melalui percikan batuk atau bersin (droplet). Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk dan sesak napas. Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.(Kemenkes RI,2020)³.

Virus corona juga menyebabkan semua kegiatan sosial-ekonomi masyarakat terhambat, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah dan kebijakan guna untuk mengatasi pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu mensosialisasikan gerakan social distancing untuk masyarakat yang bertujuan untuk memutus rantai penularan virus covid-19 dengan cara menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, Selain itu memberikan prinsip protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, meningkatkan system imun serta perilaku hidup bersih dan sehat⁴.

Pemerintah Indonesia dalam upaya menekan penyebaran virus corona menerapkan Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tertuang dalam Peraturan Kemenkes No 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (Covid-19) agar bisa dilaksanakan diberbagai daerah. Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, meliputi aktivitas sekolah, kegiatan keagamaan, social budaya, kegiatan di fasilitas umum serta operasional transportasi umum. Dalam peraturan tersebut kepala daerah, baik itu gubernur, bupati ataupun walikota harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri dengan disertai sejumlah data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal.

²World Meter Info. Di lansir dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Di Akses pada 23 juni 2021. Pukul 07.00 WIB.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 27 Maret 2020. Hal 11.

⁴ Buana. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam menghadapi covid-19 dan Kiat menjaga kesejahteraan jiwa*. National Research Tomsk State University, Universitas Mercu Buana. 2020. hal 218.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *New Normal* guna memulihkan keberlanjutan kegiatan ekonomi dan sosial, meski *Covid-19* tidak akan hilang dalam waktu dekat. Pengimplementasian kebijakan normal baru tentu akan berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, dalam kebijakan normal baru ini terdapat aturan bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas baik ekonomi maupun sosial khususnya di ruang publik harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan adanya penerapan normal baru dapat memperoleh sinergitas keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan upaya penanggulangan *Covid-19* di masing-masing daerah.

Dalam rangka untuk memulihkan aktivitas sosial, ekonomi masyarakat, kegiatan keagamaan serta pendidikan. Wali Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Surabaya. Perwali tersebut mengatur protokol kesehatan di beberapa tempat layanan publik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perwali ini bertujuan untuk penanganan COVID-19 di daerah pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 secara terintegrasi dan efektif.

Berdasarkan data survey hasil riset tim epidemiologi IKA FKM Unair terkait *Kajian Perilaku Abai Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker dan Phsyical Distancing Dalam Pencegahan Covid-19 Di Surabaya* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker sangat rendah (10,8%) dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan anjuran menjaga jarak rendah (25,45%)⁵. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap bebarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab *Covid-19* belum sepenuhnya sirna. Untuk itu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut, menghimbau kepada masyarakat Kota Surabaya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan sembari menjalankan aktivitas sosial dan juga roda perekonomian.

⁵ Ilham Akhsanu Ridlo. *Rekomendasi Hasil Diskusi Online (Zoom Meeting) IKA FKM UNAIR; Menyikapi Kebijakan PSBB Surabaya Raya Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*. 26 April 2020. Di akses melalui <https://fkm.unair.ac.id/rekomendasi-hasil-diskusi-online-zoom-meting-ika-fkm-unair-menyikapi-kebijakan-psbb-surabaya-raya-sebagai-strategi-pencegahan-dan-pengulangan-covid-19/>. Di akses pada 21 Februari 2021. Pukul 06.00 WIB.

Dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 dijelaskan pemerintah mengatur pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di area pondok pesantren agar memudahkan pesantren dalam melakukan standar upaya pencegahan *Covid-19*. Pondok pesantren juga merupakan salah satu tatanan yang perlu menerapkan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan data survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI⁶ terkait survei kesiapan respon pesantren menghadapi ancaman *Covid-19* dalam masa *new normal* menunjukkan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal* umumnya 85% pesantren menyikapi kebijakan tersebut dengan memulangkan seluruh santri serta memulangkan sebagian santri, baik dalam kategori pesantren yang hanya ngaji maupun termasuk pesantren yang ngaji dan penyelenggara pendidikan. Dan 11,6 % pesantren menyatakan tidak akan mengembalikan santrinya sampai kondisi aman *Covid-19*.

Selain itu kategori pesantren yang hanya mengaji dan kategori pesantren yang ngaji dan penyelenggara pendidikan lainnya, sebagian besar mengaku tidak mendapatkan bantuan pemerintah dan membutuhkan untuk dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. Dalam penerapan *new normal* di tengah pandemi *Covid-19* ini, aktivitas kegiatan keagamaan seperti di pondok pesantren. Situasi ini secara umum kegiatan seperti pengajian kitab secara sorogan, bila pun ada kegiatan pembelajaran jarak jauh tentu terdapat keterbatasan pada kegiatan tertentu seperti penyeteroran hafalan melalui fasilitas digital. Situasi ini memberikan gambaran kondisi obyektif di sejumlah pondok pesantren, minimnya fasilitas di pondok pesantren khususnya layanan pembelajaran keagamaan virtual di pesantren.

Pondok pesantren juga merupakan salah satu tatanan yang perlu menerapkan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19*. Saat ini pondok pesantren yang terkenal di Surabaya adalah pondok pesantren Assalafi Al-Fithrah yang berlokasi di jalan Kedinding Lor 99 Surabaya. Pondok pesantren As Salafi Al Fithrah memiliki pendidikan formal terdiri dari jenjang RA, MI, WUSTHO (MTS), ULYA (MA)⁷. Para santri dari

⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Survei Pesantren Dan Ancaman Covid-19; Respon dan Kesiapan Masa New Normal*. Juni 2020. Jakarta Pusat. Hal 29.

⁷ Budi. *Profil Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya*. Di lansir dari <https://www.googlw.com/amp/s/www.laduni.id/post/amp/42989/profil-pesantren-assalafi-al-fithrah-surabaya> . Di akses pada 10 November Pukul 07.00 WIB

pondok pesantren ini tentu berasal dari berbagai wilayah Indonesia bukan hanya dari Jawa Timur saja. Dalam masa new normal kegiatan keagamaan di pondok pesantren dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19. Untuk itu, agar tetap dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di pondok pesantren pada situasi pandemi *Covid-19* ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan.

Dalam membahas penelitian lebih lanjut maka peneliti mengambil rumusan masalah yakni bagaimana implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi *Covid-19* di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya serta untuk menilai lebih dalam bahwa bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengimplmentasian kebijakan normalisasi pada situasi pandemi *Covid-19* pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Sehingga dengan adanya rumusan masalah tersebut maka akan menghasilkan tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi covid-19 pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan normalisasi saat situasi pandemi covid-19 pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya..

Teori Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter Dan Carl Van Horn

Berikut secara rinci variabel- variabel implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan dan menghindari adanya multi intepretasi. Apabila tujuan dan standar kebijakan ini tidak dirumuskan secara jelas dan detail serta sulit diukur. Maka tingkat kejelasan tujuan dan standar kebijakan dapat membuat corak respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan.⁸ketidakpastian tujuan dan standar

⁸ Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* . sidoarjo. Dwiputra: Pustaka Jaya. 2017. Hlm 34

kebijakan disebabkan pemahaman implementator dalam melaksanakan dan sekaligus menimbulkan perbedaan instruksi sebagai aktor (elite politik) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang menyebabkan mengalami kerancuan bahkan tidak berjalan.

2. Sumber daya

Implementator merupakan bagian dari sumber daya baik dari perseorangan, kewenangan, keuangan, kelengkapan, fasilitas. Jika tujuan, isi, dan sasaran kebijakan telah disusun secara konsisten dan jelas tetapi terkendala kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, penerapan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah hanya tinggal angan-angan saja tanpa perwujudan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dalam hal ini Wahab, menyatakan bahwa sumber daya dapat terwujud sumber daya manusia maupun sumber keuangan⁹. Sumber daya diposisikan sebagai *input* dari organisasi sebagai sistem menerapkan nilai dan manfaat potensial dalam transformasi ke dalam *output*. secara teknologis sumber daya berhubungan erat dengan transformasi dari organisasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian agen pelaksana terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan apa yang akan diimplementasikan, pada beberapa kebijakan diharuskan para pelaksana kebijakan bersikap ketat dan disiplin. Dalam konteks lain juga diperlukan adanya agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhatikan dalam penentuan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi

Agar pelaksanaan kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 2007) menyatakan bahwa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang memiliki

⁹Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Press. 2008

tanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan mengenai apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

5. Sikap para pelaksana

Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa sikap menerima atau menolak dari pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga yang mengetahui persoalan kebijakan yang mereka rasakan. Namun kebijakan publik biasanya *top down* yang dimana para pengambil keputusan tidak mengetahui keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat tiga elemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap suatu kebijakan. Kedua, arah dan respon pelaksana (menerima atau menolak). Ketiga, intensitas terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana merupakan potensi besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya disposisi para pelaksana kebijakan mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Kurangnya intensitas disposisi maka akan menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai implementasi kebijakan merupakan sejauh mana lingkungan eksternal mendorong atau mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dan menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan perlu memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif dan mendukung.

Dalam penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara

individual maupun kelompok secara apa adanya¹⁰. Jenis pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan. Dalam hal ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang teliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas¹¹. Jenis penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Normalisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya) merupakan penelitian Kualitatif-Studi kasus (*case study*).

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kabag *Kewadlifahan* dan *Syiar* Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya, Santri pondok pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya, Santri Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah, Kepala Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Camat Kecamatan Kenjeran serta Masyarakat Sekitar Pondok..

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode observasi peneliti menggunakan jenis observasi *non parsipatif*, pada pelaksanaannya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati, peneliti hanya mengamati keadaan. Dengan alat bantu yang digunakan selama observasi yakni kamera, *video recorder smartphone*, panduan observasi dan buku catatan observasi yang digunakan untuk mencatat informasi yang diperlukan. Sedangkan dalam wawancara peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Alat bantu yang digunakan ketika wawancara yakni pedoman wawancara, recorder, dan buku catatan wawancara. Informasi atau jawaban dari informan yang sudah terkumpul akan diperiksa dan dianalisis untuk kevalidan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yakni triangulasi sumber dan teknik triangulasi waktu

Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah

Secara global kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya, salah satunya yakni kegiatan *wadlifah* yaitu kegiatan yang bersifat

¹⁰ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm 53

¹¹ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 3

berangkat, yakni “suatu kegiatan yang berkaitan langsung dengan Allah SWT, Baginda Habibillah Rasulilah Muhammad SAW., Sulthonul Aulia’ Syaikh Abdul Qodir Al Jilany ra, Hadhratusy Syaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqy ra. Dan Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy ra.”. Adapun rasio perbandingan mata pelajaran keagamaan dengan mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya adalah 70%: 30%. Pendidikan di Pondok Assalafi Al Fithrah.

Kegiatan *wadlifah* ini tidak boleh diubah oleh siapapun dan kapanpun. Kegiatan *wadlifah* harus didahulukan sebelum kegiatan lain ketika mulai mendirikan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah sebagai pondasi ruhananiyah. Kegiatan *wadlifah* meliputi :

- a. Jama’ah maktubah, Sholat sunah (Qobliyah dan ba’diyah Isyraq, Dhuha, Isti’adzah, Tsubutil Iman, Hajat dan Tasbih).
- b. Aurod-Aurod yang telah diTurunkan dan dibimbingkan.
- c. Qiro’atul Qur’an Al Karim dilakukan setelah tahlil shubuh, diawali dengan Al Fatihah 3 kali, membaca Al-Qur’an dengan sendiri-sendiri satu juz ditutup dengan *kalaamun* dan do’a Al-Qur’an.
- d. Maulid, dilakukan setiap malam jum’at dengan Al-Fatihah 3 kali, kemudian dengan membaca *Ya Robby, Inna Fatahna*”, *Yaa Rosulallah*“, dengan dipandu oleh pembaca, kemudian membaca rowi mulai dari “Alhamdulillah qowiyyil ghoiib” dengan dibaca sendiri-sendiri sampai “*Fathhtazal’ Arsyu*”, lalu bacaan “*Fahtazall Arsyu*” sampai “*Mahalull Qiyaam*” dibaca dengan dipandu oleh pembaca, kemudian “*Wawulida*” dan rowi-rowi setelahnya dibaca sendiri – sendiri sampai do’a. kemudian membaca “*al istiqbalat watawajjuhat wal munaajay.*” (nasyid) dengan diringi dzikir “*Laa Ilaahha il-lallaah.*”
- e. Burdah, dilakukan setelah sholat *Lisbutil* Iman. dan aurod secara sempurna, pada selain malam jum’at dan selain malam ahad, diawali dengan Al Fatihah dan ditutup dengan do’a yang telah dituntunkan.

Manaqib, dilakukan setiap malam ahad, diawali dengan *Al-Fatihah* 3 kali, kemudian membaca manaqib sendiri-sendiri selama 20 menit lalu do’a kemudian membaca *Ibadallah, Ya Arhmarrohimin* dan nasyid sampai selesai kira-kira 10-15 menit.

Situasi atau Kondisi Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah di Kecamatan Kenjeran Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya

Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah berada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding secara administrasi merupakan salah satu kelurahan di wilayah Surabaya utara. Kelurahan Tanah Kali Kedinding juga merupakan salah satu wilayah kelurahan yang terjangkit *Covid-19*. Sebagaimana berikut jumlah kasus *Covid-19* menurut *data Surabaya Lawan Covid-19* di kelurahan Tanah Kali Kedinding mencapai 371 kasus kumulatif konfirmasi, 344 konfirmasi sembuh, serta 25 konfirmasi meninggal. Jumlah kasus kumulatif mengalami kenaikan karena wilayah kelurahan Tanah Kali Kedinding berdekatan dengan Suramadu yang mana kondisi madura saat ini sedang mengalami lonjakan kasus positif *Covid-19*.

Dalam menyiapkan protokol kesehatan untuk menunjang penerapan kebijakan *New Normal* di Pondok Pesantren. Pondok Assalafi Al Fithrah pun semakin memperketat keamanan di pintu masuk pesantren yang dijaga oleh petugas keamanan pondok guna untuk mencegah penyebaran virus. Menutup akses tidak memperbolehkan masuk tamu luar, masyarakat umum, jama'ah dari luar kota untuk memastikan keamanan santri saat masa pandemi ini

Semenjak pandemi virus corona, hampir segala kegiatan keagamaan pesantren di Indonesia diliburkan. Secara universal, segala kegiatan pesantren pula terhenti total. Aktivitas seperti Ngaji kitab, hafalan Al-Qur'an dan sebagainya tidak dapat berjalan secara optimal. Para santri dipulangkan ke rumah ini semua dilakukan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran wabah virus corona.

Area pondok pesantren selain sebagai pusat pendidikan agama dan juga pelaksanaan kegiatan keagamaan. Lingkungan di pondok pesantren menjadi tempat yang dihuni ratusan bahkan ribuan santri dari berbagai daerah. Tentu di masa pandemi *Covid-19*, situasi ini berpeluang serta berpotensi menjadi media penyebaran dan juga penularan virus corona. Oleh karena itu pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya perlu melakukan pengaturan khusus serta penanganan yang tegas dengan mengacu pada pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dapat menjadikan lingkungan pondok pesantren aman dan bebas dari *Covid-19*.

Realisasi Penerapan Kebijakan Normalisasi (New Normal) di Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah Surabaya

Dalam masa pemulihan/recovery ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali ke kondisi normal. Kebijakan New Normal dipilih untuk menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas karena kehidupan yang tetap harus berjalan. Pemulihan fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana umum, sosial dan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, kegiatan keagamaan, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang tetap produktif dan aman.

Pemerintah kota Surabaya berupaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Baru terkait protokol kesehatan yakni Perwali Nomor 67 Tahun 2020. Perwali tersebut merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di Surabaya. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran ataupun keagamaan sebagaimana dimaksud salah satu nya yakni pesantren.

Dalam hal ini Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah sebagai pengelola kegiatan pendidikan keagamaan secara bersrama dan sebagai penanggungjawab santrinya. Melihat kondisi pandemi ini pihak pondok pesantren As Salafi Al Fithrah berupaya meningkatkan penerapan kebijakan normalisasi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator progam tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin protokol kesehatan dengan menyediakan wastafel cuci tangan di area pondok yang disebarkan dibeberapa titik untuk membudidayakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) kepada santri sebagai upaya pencegahan Covid-19.
2. Membersihkan lingkungan area pondok dengan penyemprotan disinfektan secara berkala. Upaya penyemprotan disinfektan di area pondok pesantren maupun di masjid pondok pesantren dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona selain itu guna menjalankan kebijakan pemerintah dalam membudidayakan pelaksanaan protokol kesehatan di area pesantren.
3. Mengedukasi santri dengan mensosialisasikan cara beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk menambah pemahaman santri agar terhindar dari covid

dengan menyediakan papan poster edukasi adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren.

4. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran kegiatan keagamaan secara virtual dan layanan penerimaan santri baru secara daring.
5. Mengantisipasi penyebaran covid-19 dengan pemberlakuan new normal secara ketat seperti menutup akses masuk pondok untuk masyarakat umum untuk menjaga kesterilan pondok karena santri telah dilakukan karantina sebelum masuk pondok. Dan dijaga ketat oleh petugas keamanan pondok.
6. Penggunaan masker, aturan jaga jarak
7. Serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi COVID-19 pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al-Fithrah Surabaya.

Awal mula virus corona muncul pada akhir Desember 2019, virus ini memberikan dampak bagi masyarakat seluruh dunia. Penyebaran virus corona telah menyebar ke 220 negara di Dunia termasuk Indonesia¹². Kemunculan virus ini menghawatirkan karena jumlah yang terinfeksi dari hari ke hari mengalami peningkatan. Adapun jumlah konfirmasi kumulatif *Covid-19* di Indonesia dilansir dari *Public Health Emergency Operating Centre (PHEOC) uptade 22 juni 2021*¹³ mencapai 2.018.113 kasus konfirmasi, 55.291 kasus meninggal, 1.810.136 kasus sembuh. Surabaya termasuk dalam salah satu kota yang terdampak *Covid-19*. Menurut data *Surabaya Lawan Covid-19* jumlah kasus *Covid-19* pada tanggal 22 juni 2021 mencapai 24,871 kumulatif konfirmasi, 23.167 konfirmasi sembuh, 1.385 konfirmasi meninggal¹⁴.

Mengingat jumlah kasus virus corona yang semakin mengalami peningkatan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menimalisir penyebaran covid-19. Salah satunya yakni dengan memberlakukan perilaku kehidupan baru atau new normal. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini, dibarengi dengan menjalani protokol

¹² Worldometers. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> . Di akses pada 22 Juni 2021 pukul 07.00 WIB

¹³ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> diakses pada 22 juni 2021.

¹⁴ Surabaya Lawan Covid-19. Dilansir dari <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> di akses pada 22 juni 2021. Pukul 07.30 WIB.

kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 secara disiplin. Kegiatan yang dilakukan sebagai aktivitas diluar rumah diantaranya untuk memulihkan perekonomian masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk tetap memperhatikan Protokol kesehatan.

Kegiatan keagamaan di pesantren pada saat ini beralih dan beradaptasi sesuai dengan protokol kesehatan. Dan dalam hal ini tentu berbeda dari situasi sebelumnya, mengingat bahwa lembaga keagamaan seperti pesantren cenderung bersifat homogen. Dalam arti, para santri terbiasa berkumpul atau berkerumunan di satu tempat. Namun dalam situasi adaptasi kebiasaan baru agar dapat hidup berdampingan dengan *Covid-19* ini para santri dan civitas pondok pesantren harus berhadapan dengan virus yang mematikan dalam melakukan ritual keagamaan. Himbauan dan berbagai kebijakan pun turut dijalankan oleh lembaga pesantren.

Pada awal masa darurat *Covid-19* pondok pesantren As Salafi Al Fithrah memulangkan para santrinya untuk menghindari resiko penularan *covid-19*. Aktivitas pembelajaran pun dilakukan secara online. Pada awal juni 2020 merupakan tahun ajaran baru, Al fithrah kembali membuka pembelajaran secara tatap muka. Untuk kedatangan santri ke pondok dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan karantina mandiri terlebih dulu, sesampainya di pondok para santri akan dilakukan *Swab* atau *rapid test* yang telah disediakan oleh pondok..

Dalam bentuk menyesuaikan “Adaptasi Kebiasaan Baru” atau bisa disebut dengan *New Normal* yang mengharuskan santri patuh pada protokol kesehatan. Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah sudah bisa dikatakan telah memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam mendukung protokol kesehatan. Selain itu dibentuk juga satuan gugus tugas bernama Santri Husada yang juga memiliki tanggungjawab dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* Di pondok pesantren.

Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini merupakan Teori Van Horn dan Van Meter Implementasi Kebijakan yaitu merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dan

Sikap para pelaksana. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Normalisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya).

1. Standar dan sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn saling berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan.

Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang di Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No 67 Tahun 2020 tersebut berisikan protokol-protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat dengan ruang lingkup meliputi pelaksanaan, pembatasan kegiatan masyarakat, kerja sama dalam penanganan *Covid-19*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat serta sanksi administratif. Perwali itu terdapat 15 poin yang dijelaskan mengenai protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan. Yang salah satunya mengatur protokol kesehatan di sektor kegiatan pada Pondok Pesantren. Ini tertuang dalam Bagian Kedua Pasal 12 ayat 1 sampai 6 sebagaimana menjelaskan mengenai penerapan protokol kesehatan pada situasi pandemic pada kegiatan di area pesantren. Peraturan daerah ini cukup dalam dijadikan acuan dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk pemenuhan adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren. Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020. Pondok pesantren Assalafi Al fithrah sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Kota Surabaya harus bisa menyesuaikan dengan “adaptasi kebiasaan baru” yang harus dilakukan di pesantren. Santri pondok pesantren Al Fithrah yang berjumlah sekitar kurang lebih 4.611 santri baik putra atau pun putri saat kedatangan di pondok akan dibagi secara bertahap untuk memecah kerumunan. Untuk itu pondok pesantren Assalafi Al Fithrah menyusun standarisasi kebijakan dalam melakukan persiapan bagi santri yang akan kembali ke pesantren sebagai berikut sesuai dengan maklumat pondok pesantren Al Fithrah Nomor 007/PAF/PSB/VI/2021 tentang kepatuhan protokol kesehatan:

- a) Kewajiban Santri Pra kedatangan

- 1) Melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing terhitung 14 hari sebelum keberangkatan dan dilengkapi dengan surat persyaratan dari wali santri bermaterai.
 - 2) Membeawa surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas setempat.
 - 3) Membeawa perlengkapan tambahan dari rumah seperti masker kain (3 lapis) atau masker medis minimal 5 pcs, vitamin C atau Habatus Souda, Zaitun, Madu dan Jahe dan perlengkapan makan dan minum pribadi.
 - 4) Santri yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, TBC, paru-paru dan penyakit lainnya untuk sementara tidak diperkenankan masuk ke pondok sampai dinyatakan sembuh oleh dokter.
 - 5) Diantarkan wali santri dengan kendaraan pribadi atau rombongan yang dikoordinir oleh Pengurus Pondok setempat.
 - 6) Saat perjalanan menuju pesantren diupayakan untuk tidak berhenti di Rest Area serta mengenakan masker dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan atau *Handsanitizer*.
- b) Proses kedatangan Santri
- 1) Kembali sesuai jadwal yang ditentukan.
 - 2) Cuci tangan dengan sabun serta air mengalir.
 - 3) Pengecekan berkas antara lain surat keterangan sehat, pernyataan wali santri.
 - 4) Registrasi kedatangan.
 - 5) Masuk ruang karantina tanpa didampingi orang tua
 - 6) Mandi dan cuci baju yang dipakai dalam perjalanan.
 - 7) Menjalani tes GeNose atau Swab ditempat karantina Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah dengan mengganti biasa Rp. 35.000 ditanggung oleh wali santri, jika hasil tes negatif maka santri bisa langsung masuk kedalam pondok.
- c) Saat dan pasca karantina
- 1) Membersihkan dan merapikan kamar serta kebutuhan pribadi.

- 2) Menaati protokol kesehatan yang berlaku di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah.
- 3) Selama masa pandemi *Covid-19* wali santri tidak diperkenankan masuk ke pondok. Akan tetapi diperbolehkan kirim uang dan makanan/ jajan dititipkan kepada pengurus, security atau petugas pondok.
- 4) Langkah usaha batin sebagai *taqarrub* mendekatkan diri kepada Allah'azza wa jalla sebagaimana dalam kitab *An Nafahat* hal 59-60 dan kitab *Fathatun Nuriyah* karya *Hadhrotusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA.*

Pelaksanaan kebijakan *New Normal* di Pondok Pesantren bergantung padakesiapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang kompeherensif kepada pesantren. Dengan adanya intervensi pemerintah setidaknya akan mencakup keluarnya regulasi (aturan dan kebijakan) *new normal* bagi pesantren.

d) Protokol kesehatan di masjid

- 1) Masjid hanya dibuka untuk santri dan warga pesantren.
- 2) Masjid dibersihkan dengan anti bakteri setiap pagi dan sore (lantai, mikrofon, tempat al-Qur'an)
- 3) Masjid dilingkungan pondok pesantren wajib menggunakan alat ibadah sendiri.
- 4) Memastikan diri dalam keadaan yang sehat sebelum melakukan kegiatan dimasjid
- 5) Menggunakan masker selama melakukan kegiatan dimasjid.
- 6) Cuci tangan dengan sabun serta air mengalir sebelum memasuki area masjid.
- 7) Setelah shalat berjamaah atau ibadah lainnya selesai dilaksanakan, jamaah tidak boleh berkerumun, tidak boleh bersalaman atau kontak fisik dengan jamaah lainnya.
- 8) Ibadah shalat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan physical distancing kurang 1 meter untuk setiap jamaah.

New Normal merupakan perubahan perilaku atau kebiasaan tetap untuk menjalankan aktifitas seperti biasanya namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi *Covid-19* ini agar tetap dapat berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa diseluruh dunia tersebut. Sejak pandemi *Covid-19* muncul, pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya bersinergi berupaya melakukan tindakan preventif dengan pemenuhan protokol kesehatan, wali santri tidak diperkenankan masuk ke dalam pondok, penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan.

2. Sumber daya

a. Sumber daya Manusia

Dapat disimpulkan bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia pihak pondok pesantren Assalafi Al Fithrah dapat dikatakan mumpuni dan bagus dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.

b. Sumber daya Anggaran

Dapat diketahui bahwa pihak pondok pesantren Assalafi Al Fithrah dalam mengusahakan pemenuhan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* ini mengalami kekurangan sumber daya anggaran. sumber daya anggaran pondok dirasa kurang dalam situasi pandemi covid 19 ini. Karena mengalami penurunan sebab para santri diliburkan.

3. Komunikasi antar Organisasi

Dalam pelaksanaannya, implemantator sebagaimana menyatakan telah menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Komunikasi merupakan hal krusial dalam menunjang keberhasilan dalam kebijakan. Dalam pelaksanaannya bahwa sudah ada hubungan komunikasi dari pihak pemerintah daerah , Puskesmas Tanah Kali Kedinding kepada pihak pondok pesantren melakukan pemantauan serta monitoring secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan di pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Dalam hal ini apabila Pondok Pesantren, Pemerintah setempat seperti Kelurahan Kedinding, Kecamatan Kenjeran dan Puskesmas Tanah Kali Kedinding menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin sebuah keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik meliputi struktur birokrasi, norma serta hubungan yang terjadi dengan birokrasi yang saling berkaitan mempengaruhi implementasi suatu program. Pelaksana kebijakan new normal yakni Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada para sasaran kebijakan yakni para santri. Cakupan wilayah pondok pesantren yang luas serta jumlah santri yang cukup banyak berasal dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan. Pengawasan yang ketat dan disiplin serta diimbangi dengan personil yang berkompeten akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan *New Normal*.

5. Kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya

Implementasi kebijakan New Normal di pondok pesantren As Salafi Al Fithrah ini tentu memberikan dampak terhadap perubahan perilaku kepada para santri atau pun para pengasuh pondok. Dengan adanya aturan penerapan protokol kesehatan membuat menambah kesadaran para santri, pengurus, ustad ataupun ustadzah dalam upaya pengendalian dan pencegahan persebaran *Covid-19* di lingkungan pondok pesantren

Dari segi ekonomi, telah memberikan dampak kepada pondok pesantren dengan kurangnya pemasukan saat kondisi pandemi *Covid-19*. Dari segi sosial, terdapat perubahan perilaku dalam pembiasaan perilaku hidup sehat baik dilakukan oleh santri, pengajar maupun pengasuh pondok selain itu Gerak serta ritus ibadah di pesantren pula wajib disesuaikan dengan protokol kesehatan, aktivitas peribadatan ataupun pengajian yang menimbulkan kerumunan pula wajib dibatasi serta diatur sedemikian rupa. Dari segi politik implementasi kebijakan normalisasi di pondok pesantren masih diperlukan perhatian dari pemerintah untuk mendukung pengimplementasian kebijakan tersebut, selain itu konsisten dan komitmen yang kuat karena mengingat tentu dalam mengimplementasikan kebijakan new normal langkah yang ditempuh pondok pesantren As Salafi Al Fithrah sudah tepat walaupun terdapat tantangan dan hambatan.

6. Disposisi Implementator

Sikap pelaksana ditunjukkan oleh pihak pondok pesantren dalam pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana protokol kesehatan dalam menunjang kebijakan *New Normal* pada masa pandemi *Covid-19* ini seperti menyediakan wastafel cuci tangan di beberapa titik

di area pondok pesantren, penyediaan *Handsantitizer*, penyediaan poster edukasi adaptasi kebiasaan baru, aturan jaga jarak, memakai masker.

Terkait dengan pemahaman implementator terhadap pengimplementasian kebijakan new normal dapat dikatakan sudah baik karena implementator telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prosedur itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pokok implementor. Namun, dari beberapa implementor yang telah paham terhadap program ini, pastinya ada juga dari beberapa dari mereka yang masih kurang patuh terhadap apa yang harusnya mereka lakukan dan bisa menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selanjutnya, para implementor pun menganggap bahwa kebijakan ini memang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19. Selain itu demi kemaslahatan pondok pesantren agar terhindar dari covid-19.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi covid-19 di pondok pesantren dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn. Dikategorikan dalam variabel yang saling berkaitan satu sama lain yakni Standar, Ukuran dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik Badan, Komunikasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Upaya yang dilakukan pondok pesantren as salafi al fithrah dalam menerapkan kebijakan new normal di pondok yakni dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan dengan menyediakan wastafel cuci tangan, aturan jaga jarak dan memakai masker, penyemprotan disinfektan., penutupan akses pondok untuk mencegah resiko penularan, mengedukasi para santri untuk meningkatkan pemahaman kepada santri terkait kebiasaan adaptasi baru di masa pandemi , penggunaan inovasi teknologi, serta meningkatkan Berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam penelitian yakni kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan selain itu minimnya sumber daya anggaran pondok pesantren dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di situasi pandemi *Covid-19* ini dan faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan ini yakni koperatif nya para pengurus Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dalam melaksanakan protokol kesehatan selain itu

sumber daya manusia yang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya dirasa cukup oleh penulis dalam memberikan aturan penegakan proktol *New Normal* di pondok pesantren yang merupakan berada di lokasi zona merah terdampak covid. Mengingat bahwa lokasi pondok pesantren berada di zona merah. Pemerintah kota surabaya perlu memberikan perhatian serius dalam hal pengawasan untuk penerapan kebijakan new normal pada aktivitas keagamaan di pondok pesantren.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Press. 2008
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Survei Pesantren Dan Ancaman Covid-19; Respon dan Kesiapan Masa New Normal*. Juni 2020. Jakarta Pusat. Hal 29.
- Buana. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam menghadapi covid-19 dan Kiat menjaga kesejahteraan jiwa*. National Research Tomsk State University, Universitas Mercu Buana.2020. hal 218.
- Budi. *Profil Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya*. Di lansir dari <https://www.googlw.com/amp/s/www.laduni.id/post/amp/42989/profil-pesantren-assalafi-al-fithrah-surabaya> . Di akses pada 10 November Pukul 07.00 WIB
- <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> diakses pada 22 juni 2021.
- Ilham Akhsanu Ridlo. *Rekomendasi Hasil Diskusi Online (Zoom Meeting) IKA FKM UNAIR; Menyikapi Kebijakan PSBB Surabaya Raya Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*. 26 April 2020. Di akses melalui <https://fkm.unair.ac.id/rekomendasi-hasil-diskusi-online-zoom-meting-ika-fkm-unair-menyikapi-kebijakan-psbb-surabaya-raya-sebagai-strategi-pencegahan-dan-penggulangan-covid-19/> .Di akses pada 21 Februari 2021. Pukul 06.00 WIB.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.27 Maret 2020.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* . sidoarjo. Dwiputra: Pustaka Jaya. 2017.

Surabaya Lawan Covid-19. Dilansir dari <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> di akses pada 22 juni 2021. Pukul 07.30 WIB.

World Meter Info. Di lansir dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Di Akses pada 23 juni 2021. Pukul 07.00 WIB.

Worldometers. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> . Di akses pada 22 Juni 2021 pukul 07.00 WIB

Yuliana. Corona Virus Disease Covid-19 ; *Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine*. Volume 2 Nomor 1 february 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ISSN 2655-9951.